

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Atmasasmita, R. (2013). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (3 ed.). Kencana Prenada Group.
- Bakhri, S. (2014). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan* (I. S. Chandranegara, Ed.). Pustaka Pelajar.
- BPS Provinsi Jawa Barat. (2024). *Direktori Industri Manufaktur Jawa Barat 2023*. BPS Provinsi Jawa Barat.
- Erwin, M. (2019). *Hukum Lingkungan Sistem Kebijaksanaan Lingkungann Hidup* (Rachmi, Ed.; II). PT Refika Aditama.
- Hakim, L. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Deepublish.
- Husin, sukanda. (2020). *Penegakan Hukum Lingkungan* (Tarmizi, Ed.). Sinar Grafika.
- Kanter, E. Y. , S. H., & Sianturi, S. R. , S. H. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. StoriGrafika.
- Machmud, S. (2007). *Penegakan Hukum Lingkungan*. CV Mandar Maju.
- Mertokusumo, S. (2019). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Maha Karya Pustaka.
- Muhammad, R. (2010). *Kemandirian Pengadilan Indonesia*. FH UII Press.
- Qamar, N. (2021). *Seni Interpretasi Hukum (Interpretation's Art of Law)*. PenerbitMitraWacanaMedia.
- Sihombing, E. N. A. M., & Hadita, C. (2022). *Penelitian Hukum* (1 ed.). SetaraPress.

Soekanto, S., & Sulistyowati, B. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar* (Revisi). Rajagrafindo Persada.

Sutiyoso, B. S. H. , M. Hum. , Dr. (2015). *Metode Penemuan Hukum*. UIIPressYogyakarta.

Waluyo, B. (2020). *PENYELESAIAN PERKARA PIDANA: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif* (Tarmizi, Ed.). Sinar Grafika.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah

C. JURNAL DAN LAIN-LAIN

Abubakar, M. (2019). Hak Mengajukan Gugatan dalam Sengketa Lingkungan Hidup. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21(1), 93–108.
<https://doi.org/10.24815/kanun.v21i1.12766>

- Ansari, M. I. (2014). Implikasi Pengaturan Lingkungan Hidup terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam Kegiatan Bisnis (Perspektif Konstitusi). *Jurnal Konstitusi*, 11.
- Asnah, N. (2023). KEBIJAKAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BAGI MASA MENDATANG. *JSMI Jurnal Senpling Multidisiplin Indonesia*. <http://senpling.pelantarpress.co.id/1>
- Aufa, A. A. (2021). Prinsip Sustainable Development dalam Penegakan Hukum Lingkungan. *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 1(2).
- Batubara, R. (2024). PERANAN INTERPRETASI HUKUM DALAM PRAKTIK PERADILAN DI INDONESIA. *EL-SIRRY: JURNAL HUKUM ISLAM DAN SOSIAL*, 2(1), 71–92. <https://doi.org/10.24952/ejhis.v2i1.11384>
- Erick Disy Darmawan. (2024, Juli 17). *Abai Kebersihan Lingkungan*, 67 *Perusahaan di Majalengka Ditegur*. detikjabar.
- Erika Erika, & Eva Gusmira. (2024). Analisis Dampak Limbah Sampah Rumah Tangga Terhubung Pencemaran Lingkungan Hidup. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(3), 90–102. <https://doi.org/10.58192/profit.v3i3.2245>
- Imanuddin, I. (2020). PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA LINGKUNGAN. *Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 143–165. <https://doi.org/10.29313/shjih.v17i2.592>
- Irawati, A. C. (2018). PENERAPAN GUGATAN CLASS ACTION GUNA MENCAPAI ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN (STUDI KASUS DI LINGKUNGAN HIDUP). *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, 11(2).
- Janis, I. K. (2016). MEKANISME GANTI RUGI AKIBAT PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009. *Lex Crimen*, v(5).

- Jimika, F. (2019). Dampak Pembangunan Bandara Kertajati Terhadap Struktur Perekonomian Majalengka. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 3(1), 11–21. <http://jurnal.unma.ac.id/index.php/Mr/index>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2024, Mei 29). *Bimbingan Teknis Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3 dan Non B3*. Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Mccold, P., & Wachtel, T. (2003). Restorative Practices In Pursuit of Paradigm: A Theory of Restorative Justice. *International Institute For Restorative Practices*. www.restorativepractices.org □ □
- Meimunah, Tehupeior, A., & Widiarty, W. S. (2024). Hak Korban Tindak pidana Pencemaran Lingkungan Atas Restitusi. *Action Research Literate*, 8(5). <https://arl.ridwaninstitute.co.id/index.php/arl>
- Muthmainnah, Rasyid, W., & Lestari, I. (2020). Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup. *Madani Legal Review*, 4(2).
- Nainggolan, M. (2021). PENEGAKAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP MELALUI SISTEM PERADILAN PIDANA. *THE JURIS*, 2, 327–341. <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris>
- Nurmalasari, F., Fatmawati, S., & Yusuf, M. (2024). PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ILLEGAL MINING TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN KONAWE UTARA. *Gorotalo Law Review*, 7.
- Oktobrian, D., Hendriana, R., Retnaningrum, D. H., & Nurhuda, M. L. (2023). PENGAWASAN PELAKSANAAN KESEPAKATAN MEDIASI PENAL DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TAHAPAN PENYIDIKAN. *LITIGASI*, 24(1), 14–39. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v24i1.6208>

- Paramasatya, A., & Rudiarto, I. (2020). Implikasi Penetapan Wilayah Pusat Pertumbuhan *Industri* Terhadap Penggunaan Lahan Di Kabupaten Majalengka. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 16(2), 144–157. <https://doi.org/10.14710/pwk.v16i2.22257>
- Purnawan, B. (2024). Jurnal Teknologi dan Sains Modern Optimalisasi Pemusnahan Barang Bad Stock (*BS*) menggunakan Insinerator Sederhana pada CV. TJU. *Jurnal Teknologi dan Sains Modern*, 1(3), 81–88. <https://doi.org/10.69930/jtsm.v1i3.17>
- Rahmadanti, D., & Subekti, R. (2022). PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN MELALUI SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN LIMBAH B3 DI KOTA SURAKARTA. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>
- Sardari, A. A., & Far Shodiq, J. '. (2022). Peradilan Dan Pengadilan Dalam Konsep Dasar, Perbedaan Dan Dasar Hukum. *JIFLAW : Journal Of Islamic Family Law*, 1(1). <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>
- Solikin. (2010). PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN. *KANUN*, 52.
- Suryawan, I. K. A. E., Sugiarta, I. N. G., & Utama, I. N. (2021). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pencemaran Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(1), 59–63. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3092.59-63>